

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2018 DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI



Oleh :

DESY SULASTRI
NIM. 11575204908

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2019**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018 DI DESA SAWAH KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

DESY SULASTRI
NIM. 11575204908

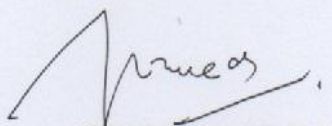
**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIA
2019**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DESY SULASTRI
NIM : 11575204908
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018 DI DESA SAWAH KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING



Afrinaldy Rustam S.IP, M.Si
NIP: 197404202014111001


MENGETAHUI:

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. MUH. SAID HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN
Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DESY SULASTRI
NIM : 11575204908
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018 DI DESA SAWAH KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR
HARI/TANGGAL UJIAN : JUMAT/20 DESEMBER 2019

PANITIA PENGUJI

KETUA



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

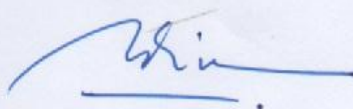
ANGGOTA

PENGUJI I



Ikhwani Ratna, SE, M.Si
NIP. 19830827 201101 2 014

PENGUJI II



Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc. Sc
NIK. 130717108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018 DI DESA SAWAH KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR**

Oleh :

DESY SULASTRI

Desa adalah suatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengalokasian Dana Desa mengacu pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan Bupati kampar No. 8 tahun 2016. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi dana Desa Tahun 2018 dan mengetahui kendala-kendala pengelolaan Alokasi dana Desa yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai acuan dalam mengambil data Desa, Ada empat indikator yang dapat di analisa dalam Pengelolaan Alokasi Dana yaitu transparansi, Akuntabilitas, transparansi serta tertib dan disiplin. Dari indikator diatas hasilnya yaitu, Pemanfaatan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum terlaksana dengan dengan baik, belum adanya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kurangnya swadaya masyarakat.

Kata Kunci : Desa, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW, rasul pilihan serta suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabatnya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Pembuatan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul” ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD TAHUN ANGGARAN 2018 DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR”

Selanjutnya, kesempatan ini izinkan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do'a, dan dukungan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Dasman dan Ibunda Zaimar Terimakasih ayah atas segala cinta dan kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan selama ini dan perjuangan selama ini

2. Kepada adik saya Indah Lestari, adik ke tiga saya M. Assaddiqie dan adik terakhir saya Nurfadila fitri serta keluarga besar di Air tiris , Pekanbaru dan Pongkai. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang, semangat, serta masukan dan motivasinya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said, M.Ag.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan semakin maju.
5. Ibu Dekan, Dr. Leny Nofrianti, SE, M.Si, Ak selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
7. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.Kp Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
8. Bapak Afrinaldy Rustam S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademi dan selalu memberikan semangat serta arahnya, dan Ibu Virna Museliza yang juga memberikan arahnya dalam proses Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terima kasih juga kepada pegawai, staff, satpam dan Cleaning service Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama proses pengerjaan skripsi.
12. Kepada bapak dan ibu perpustakaan yang memberikan kemudahan baik dalam peminjaman buku ataupun skripsi.
13. Kepada pihak Desa sawah, yang telah mempermudah dalam memberikan data dalam penelitian.
14. Sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga Asma Juwita, Rani Mulana Sumita, Yuni Novita Sari, Siti Nur Aulia, Madiatul ulfa, Kardo Handika, Alif, Dian Novita, Wulandari yang selama ini selalu ada disaat aku selalu membutuhkan bantuan ketika terpuruk dalam masa perkuliahan.
15. Teman tidur Nurul sulastris yang selalu memberi semangat saat masalah datang menghampiri.
16. Sahabat - sahabat seperjuangan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2015 terkhusus Lokal C dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu - persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis.
17. Untuk Teman KKN Desa Pongkai Kecamatan Kampar Utara yang telah memberikan dukungan dan juga Do'a Nya sehingga Penulis Dapat menyelesaikan Skripsi ini.
18. Untuk M. Qodri yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini
19. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin YaRabbal Alamin.

Pekanbaru, Desember 2019
Penulis

Desy Sulastrri

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Desa	14
2.2 Otonomi Desa	16
2.3 Keuangan Desa	20
2.4 Perintah Desa	21
2.5 Pengelolaan Keuangan Desa	25
2.6 Anggaran Dana Desa (ADD)	31
2.7 Pembinaan dan pengawasan ADD	34
2.8 Pemberdayaan Masyarakat	35
2.9 Pandangan Islam	37
2.10 Dasar Hukum Anggaran Dana Desa (ADD)	39
2.11 Penelitian Terdahulu	39
2.12 Defenisi Konsep	43
2.13 Konsep Operasional	43
2.14 Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	47

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data	48
3.4 Informan Penelitian	48
3.5 Kriteria Key Informan Penelitian	49
3.6 Validasi Data	49
3.7 Metode Pengumpulan Data	49
3.8 Metode Pengelolaan Data	51

BAB IV GAMBARAN UUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa sawah	53
4.2 Batasan Wilayah	53
4.3 Visi Dan Misi Desa Sawah	54
4.3.1 Visi	54
4.3.2 Misi	54
4.4 Sarana Dan Prasarana yang dimiliki Kantor Desa Sawah	54
4.5 Kondisi Dan Wilayah	56
4.6 Kondisi Demografi	56
4.7 Mata Pencairan Penduduk Desa Sawah	57
4.8 Pendidikan dan Kehidupan Beragama	57
4.9 Kesehatan	59
4.10 Adat Istiadat	59
4.11 Potensi Desa	60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	63
5.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Utara Kabupaten Kampar	63
5.2.1 Pengelolaan ADD dari Prinsip Transparan	65
5.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari prinsip Akuntabel	67
5.2.3 Kendala dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggran 2018 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

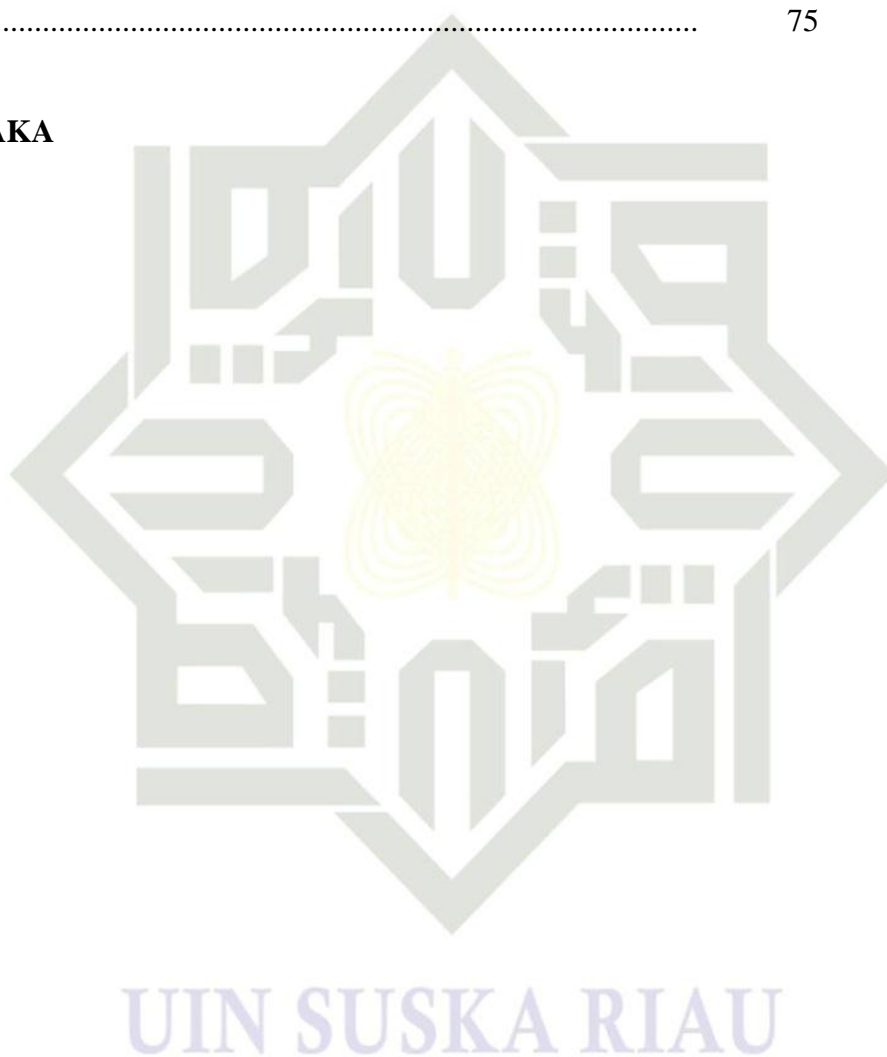
5.3 Kendala dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.....	70
--	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

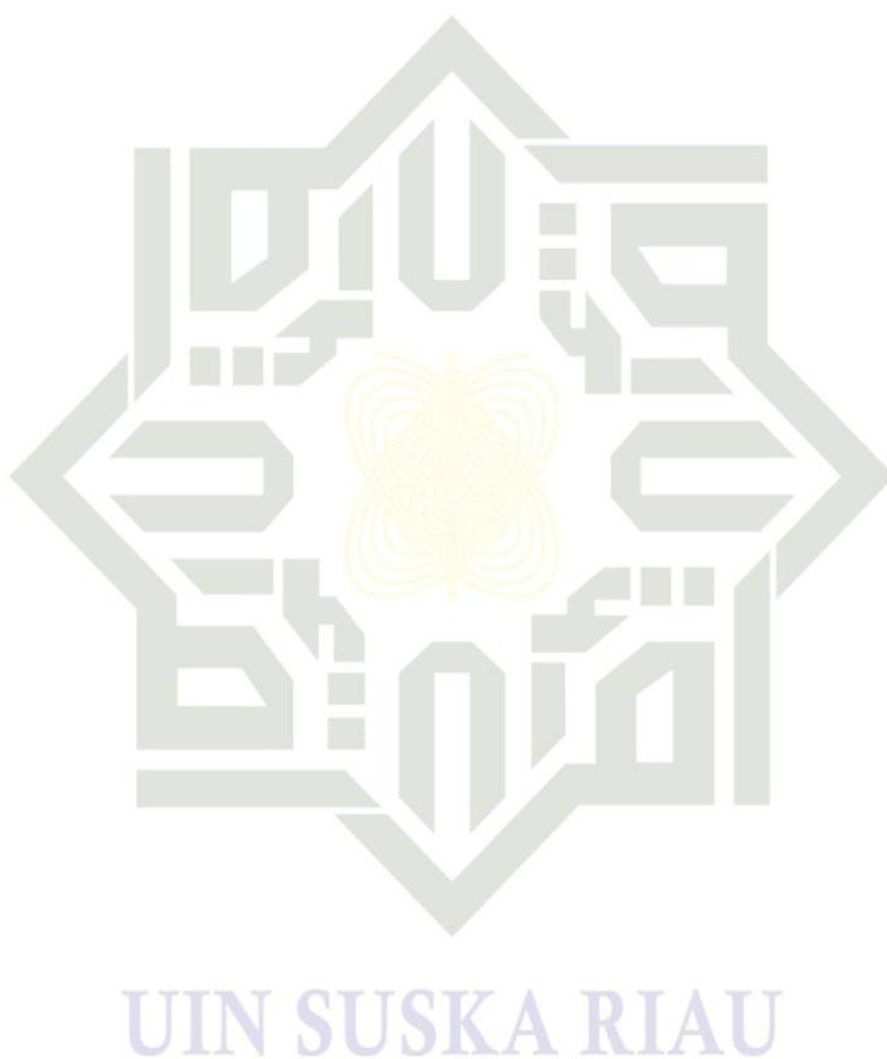
© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
Tabel 1.1	Rincian Anggaran Dana Desa di Desa Sawah
Tabel 1.2	Musyawarah Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.....
Tabel 1.3	Data Perencanaan Desa Sawah
Tabel 1.4	Daftar Absensi Rapat
Tabel 2.1	Konsep Operasional
Tabel 3.1	Key Informan
Tabel 4.1	Sarana dan Prasarana di Kantor Desa Sawah.....
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Peduduk di Desa Sawah
Tabel 4.4	Sarana Pendidikan di Desa Sawah
Tabel 4.5	Sarana Beribadatan di Desa Sawah.....
Tabel 5.1	Rincian Anggaran Dana Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	62



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur undang-undang. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota adalah wali kota.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk Provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada masyarakat. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam UU nomor 32 Tahun 2004 adalah guna terwujudnya

kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun tidak berat otonomi diletakkan pada tingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak tergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh bantuan pembangunan dari pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down).

Meskipun programnya baik tetapi seiring tidak bertemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering dijumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya. Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintahan, Swasta maupun masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam PP 72/2005 tentang Desa. Dalam PP ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi Pemerintahan dari pusat sampai dengan Kabupaten/kota untuk

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
Site Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

memberikan transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibah ataupun donasi. Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke Desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipasi akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung meralisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya .

Beberapa manfaat dari alokasi dana ke desa adalah :

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambilan kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri yang mengambil bagian dari pengambilan keputusan .
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, karean dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat sehingga memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan bahkan meniadakan penyimpangan dan penyelewengan .

Adapun tujuan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa .
 - b. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa .
 - c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan , kesempatan, berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat
 - e. Meningkatkan kemandirian desa
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Adapun peranan Kepala Desa dan perangkatnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
1. Mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Alokasi adna Desa (ADD)
 2. Membentuk tim pelaksana tingkat desa
 3. Menurut Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan bersama lembaga-lembaga terkait dan tokoh masyarakat.
 4. Mendampingi bendahara desa pada saat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)
- Kepala Desa sangat berperan penting dalam mengelola Alokasi DanaDesa (ADD) yang mana Kepala Desa mempunyai wewenang untuk penyelenggaraan rumah tangganya dn melaksanakan tugas pemerintah, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini termasuk tugas penting Kepala Desa, karean Alokasi Dana

Desa (ADD) ini dipercayakan penuh kepada Kepala Desa yang dipergunakan untuk keperluan Desa, apabila Kepala Desa ataupun perangkatnya tidak mengalokasikan Dana Desa dengan sebaik-baiknya, maka desa tersebut tidak akan mencapai kemakmuran, karena tidak adanya kejujuran antara pemerintahan Desa dengan masyarakat Desa .

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradosional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016, terdapat Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, diantaranya :

- a. Keuangan Desa termasuk Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilakukan dan di evaluasi secara tranparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- d. Setiap pengeluaran belanja bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mandapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengesahan oleh Kepala Desa atau kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang maksud .

e. Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (WAPU) atas pajak penghasilan , pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya wajib untuk memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan sehubungan dengan masalah tersebut, penelitian untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.**

Tabel 1.1
Rincian Anggaran Dana Desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2016-2018

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	2016	Rp. 1.209.250.000
2.	2017	Rp. 1.292.586.000
3.	2018	Rp . 2.820.121.300

Sumber : Kantor Desa Sawah

Berdasarkan Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dana Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dapat di ketahui anggaran Dana Desa 2016 berjumlah Rp. 1.209.250.000 Anggaran Dana Desa Tahun 2017 berjumlah Rp. 1.292.586.000 dan Anggaran Dana Desa Tahun 2018 berjumlah Rp. 2.820.121.300.

Tabel 1.2
Musyawarah Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

No	Tahun Anggaran	Peserta	Jumlah
1.	2017	Kepala Desa Perangkat Desa BPD	1 4 2
2.	2018	Kepala Desa Perangkat Desa BPD Kepala Dusun	1 4 3 4

Sumber Bagian Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, ketahuilah bahwa pada tahun anggaran 2017 dan 2018 selama ini masyarakat tidak pernah diundang baik secara tertulis maupun lisan untuk mengetahui rapat/pertemuan mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa hanya dilaksanakan dengan perangkat Desa dan BPD, namun tak seluruh anggota BPD hadir dalam musyawarah tersebut dan juga tidak melibatkan lembaga-lembaga desa Sawah seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepemudaan bahkan LPM.

Selain itu, perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sawah di anggarakan berdasarkan keperluan yang ada di Desa Sawah itu sendiri. Dari data perencanaan yang sudah dianggarkan, ada perencanaan pembangunan, target dan realisasinya. Adapun realisasi dan targetnya dikategorikan tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari

tabel berikut ini :

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Data Perencanaan Desa Sawah Tahun 2018

	Pembangunan	Target	Terealisasi	Persentase
1.	Seminisasi	197.563.000	181.645.000	91,94%
2.	Pembuatan jalan dusun tanjung ke pulau tengah	85.000.000	85.000.000	100%
3.	Semenisasi jalan lingkungan 500 m	154.067.500	154.067.500	100%
4.	Drenase 2 500 m	152.075.800	142.758.000	93,87%
5.	Turap mini jembatan pulau tengah	67.989.000	67.989.000	100%
6.	Pembangunan lokal PDTA Pulau Tengah	68.635.000	68.635.000	100%
7.	Pembuatan kramik surau dusun tanjung	77.929.000	77.929.000	100%
8.	Pembangunan paud safanur	602.894.000	602.894.000	100%
9.	Paud harapan bunda	553.980.000	553.980.000	100%
10.	Rehap paud permata ibu/ sawah	19.528.000	19.528.000	100%
11.	Pembuatan gedung posyandu sangkar puyuh	57.687.000	54.687.000	94,79%
12.	Pembuatan gedung posyandu tanjung	529.048.000	519.048.000	98,10%
13.	Rehap posyandu sawah	39.989.000	38.978.000	100%
14.	Pembelian speat boet	70.000.000	70.000.000	100%
15.	Kegiatan gerakan parit& pembersihan parit	33.900.000	33.900.000	100%
16.	Peralatan olahraga (tenis meja) 4 set	24.000.000	24.000.000	100%
17.	Intensif guru paud, TK, PDTA, TPA, infentaris	16.964.000	16.964.000	100%
18.	Intensip posyandu Pakaian seragam posyandu	68.693.000	68.693.000	100%
	JUMLAH	2.820.121.300	2.780.695.500	98,60%

Berdasarkan data Tabel 1.3 diatas menjelaskan Data Perencanaan Desa Sawah Tahun 2018, Target Dana perencanaan yaitu Rp. 2.820.121.300 dan yang Terealisasi sebesar Rp. 2.780.695.500 dengan Total Persentase sebesar 98,60%.

Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
Daftar Absensi Rapat

	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1.	Azwirman	Anggota BPD	Pulau tengah	Hadir
2.	Islami	RW 02	Sangkar puyuh	Hadir
3.	Sugiono	Sek. BPD	Sawah	Hadir
4.	Suwardi	RT 04	Sawah	Hadir
5.	M. syafii	RT 01	Sangkar puyuh	Hadir
6.	Kaspul ilmi	Tokoh pemuda	Pulau tengah	Hadir
7.	Andrizal	Tokoh masyarakat	Tanjung	Hadir
8.	Nazri	LPM	Sawah	Hadir
9.	Siban	RT 02 Tanjung	Tanjung	Hadir
10.	Maryudin	RW 02 pulau tengah	Pulau tengah	Hadir
11.	Nasrin	RT 02 Pulau Tengah	Pulau tengah	Hadir
12.	M. ali	RT 03	Pulau tengah	Hadir
13.	Faizal	Kadus	Sawah	Hadir
14.	M. yunus	Anggota BPD	Pulau tengah	Hadir
15.	Elfebriani	LPM	Tanjung	Hadir
16.	Idris	RT 01	Sawah	Hadir
17.	Helmi nazri	Rt 04	Sangkar puyuh	Hadir
18.	Syahril	RW 02	Sawah	Hadir
19.	Daril	Anggota BPD	Sawah	Hadir
20.	Masyudin	RT 01	Sawah	Hadir

Sumber : Kantor Kepala Desa 2019

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa yang hadir dalam rapat adalah sebanyak 20 orang. Adapun yang menghadiri rapat tersebut yaitu anggota badan permusyawaratan desa (BPD), RT dan RW dari 4 Dusun Sawah, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1.2 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan masalah

Adapun Rumusan Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2018 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengelolaan alokasi dana desa tahun 2018 yang ada di desa sawah kecamatan kampar utara Kabupaten Kampar .
2. Untuk menganalisa kendala-kendala pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Penulisan proposal ini dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dari teori yang dipelajari selama ini. Selain itu di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang administrasi Negara.
2. Manfaat Praktek
Diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan solusi kepada masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar .



- 1.5 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa pasal, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori, definisi dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu serta menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi Lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, perumusan model penelitian, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang sejarah, visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi dan kegiatan perusahaan.



BAB V : HASIL DAN KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu mengenai Analisis pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang Kesimpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta saran dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Desa

Hanif Nurcholis (2011 :3) mengatakan desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda, Desa adalah sesuatu pemerintah yang memiliki hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupaten atau kota di wilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 tahun 2016 diatas sangat jelas bahwa desa merupakan community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, Maka posisi desa yang memiliki otonomi asli yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang lebih terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan adanya otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pengertian desa menurut beberapa para ahli dalam buku Hanif Nurcholis (2011:4) R. Bintarto desa adalah suatu perwujudan geografis yang menimbulkan

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Staf Ismail University of Sultan Sa'arif Kasim Riau

oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat di situ didalam hubungan dan pengaruh timbal- balik degan daerah-daerah lain .

P .J . Bournen desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu, hampir semua mengenal, kebanyakan yang termasuk dalam kehidupan pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, kekuatan dan kaedah-kaedah sosial.

Nyoman Beratha desa nama aslinya sesingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintah: yang merupakan bagian wilayah kecaamatan atau wilayah yang melingkunginya.

R. H Unang Soenardjo desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya ; memiliki susunan mengurus yang dipilih besama; memiliki kekaayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Desa berasal dari bahasa India, Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yuliati dan Poernomo, 2003: 23). Menurut PP No.57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

2.2 Otonomi Desa

Jika berbicara otonomi, desa merupakan aspek atau bagian yang tidak dapat kita pisahkan. Otonomi desa yang dikenal sebagai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang Otonomi Desa menurut (Berartha dalam buku Almasri dan Muamar Alkadafi; 2018 205) memaparkan otonomi desa merupakan otonomi desa merupakan otonomi yang

khlas/asli bangsa indonesia seiring dengan perkembangan peradabannya serta diperoleh secara tradisional atau bersumber dari hukum adat (asli indonesia) perwujudannya tercermin dalam tata kehidupan masyarakat atau pemerintah desa adat.

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagaimana kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dan pemerintah. Desa atau nama lainnya. Yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Otonomi desa merupakan hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Menurut (Widjaja :2002) otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak usul-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Kewenangan dan kebebasan dalam menyelenggarakan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan Desa meliputi :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
 2. Kewenangan lokal berskala Desa.
 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerinah Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah
 4. Kabupaten/Kot
 5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.
- Peraturan mengenai desa mengalami babak baru pasca ditanda tangani UU. No 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, pada bulan januari 2014, terdapat beberapa perubahan signifikan pada penyelenggaraan Pemerintah desa. Substansi yang berda dengan Uu sebelumnya yaitu UU. No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan PP No.72 Tentang Desa adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa bisa menjabat sampai 3 kali masa jabatan (18 tahun)
 - b. Pemilihan Kepala Desadilaksanakan secara serentak untuk satu kabupaten/kota.
 - c. Desa menerima alokasi anggaran langsung dari APBN selain alokasi dana desa dari APBD
 - d. BPD bersifat wajib untuk dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah.
 - e. Sekretaris desa dan kaur desa diberhentikan pada umur 60 tahun.
 - f. Masa jabatan BPD sampai 3 kali masajabatan (18 tahun)
 - g. BPD secara konstitusional bukan lagi penyelenggaran pemerintahan Desa,tetapi hanya menjalankan 3 fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Terbuka ruang untuk eksistensi desa adat
 - i. Terbuka ruang untuk pembentukan Sistem Informasi Desa.
 - j. Terbuka ruang untuk pembentukan Lembaga Adat Desa.
 - k. Sekdes sudah tidak lagi berasal dari PNS tetapi dari penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi syarat.
- Secara umum, eksistensi dan wewenang desa menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan sangat tergantung pada penyelenggaraan pemerintah desa untuk percepatan pembangunan di desa.
- ### 2.3 Keuangan Desa
- Hanif Nurcholis (2011 :81) keuangan desa adalah semua kehendak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.
- (Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1) menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- Sumber pendapatan Desa berasal dari :
- a. Pendapatan asli desa berasal dari usaha desa, hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang bagi kesetiap desa secara proposiaonal yang merupakan alokasi dan desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mangikat.

2.4 Pemerintah desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- m. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan

mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-undang Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50 Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Staf Islamite University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- k. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- o. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Menurut Richard dan Musgrave (1993: 6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (allocation Function), fungsi distribusi (distribution function), dan fungsi stabilisasi (stabilization function).

Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar.

Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga pada level yang rasional, atau mencapai tingkat

pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dilakukannya oleh pemerintah desa dalam perekonomian desa untuk itu pemerintah desa memerlukan berbagai kewenangan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun

2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang.

Menurut Suharto (2010:71), perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung

dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, sementara itu

Menurut Manila I. GK. (1996:25) mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada. Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa.

RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBD Desa.



b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I. C.K. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian menurut Suharto (2010:79) Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penatausahaan

c. Hak Cipta Dimiliki Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

Pelaporan

Menurut Peraturan Bupati Wajo nomor 2 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporanakhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa

e. Pertanggung Jawaban

Menurut Peraturan Bupati Wajo nomor 2 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesaKepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk

laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) .

Menurut Mardiasmo (2002: 105), ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut

3. Prinsip value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

(Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk

melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah: (Poerwadarminta, 2002:123)

2.6 Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

Menurut Widjaja H.A.W.(2003:113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat.

Perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana. (Robert Simanjuntak, 2002: 158)

Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsippemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa(ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa(ADD)tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu Menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima . Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui keseimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

Menurut Sahdan, Terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut: (Sahdan, 2006:16)

- a. Kabupaten/kota dapat menghematkan tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih Strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

2.7 Pembinaan dan Pengawasan ADD

Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten /Kota kepala desa. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan wajib membina mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kab/kota meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan tanggungjawaban APBDes.

- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Sedangkan menurut widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut :

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasi/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan rapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat (Mas'oet, 1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat di samakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah (Pranaka, 1996).

Sulistiyani (2004: 43) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pandangan Islam

Q.S Muhammad :21

طَاعَةُ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾

Artinya: "taut dan mengucap perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka." (Muhammad :21)

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, yaitu menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Kemudian Allah memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar. Artinya bahwa dalam mencari teman, kita juga harus memilih mana teman yang baik yang nantinya membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan mana teman yang menyesatkan. Jadikanlah orang baik sebagai teman dan tinggalkan orang yang menyesatkan. Ibarat kata jika kita bergaul dengan orang baik, maka kita akan sedikit demi sedikit menyesuaikan diri dengannya, sebaliknya jika kita bergaul dengan orang jahat.

Q.S Al-Maidah Ayat : 8

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ هَٰؤُلَاءِ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah :8)

Menjadi adil dan jujur bagi diri sendiri saja sulit, apalagi menjadi adil dan jujur bagi orang lain. Sehingga perilaku adil dan jujur ini sudah selayaknya dilatih sejak kecil agar terbawa hingga dewasa. Menjadi orang yang menegakkan kebenaran adalah dengan cara yang jujur dan adil, kita tidak bias menghakimi orang yang tidak bersalah hanya karena kebencian pribadi.

Surat Qs.ArRa'd : 11

لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ ۚ وَاللَّهُ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Potongan QS. Ar Ra'd:

11)

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

2.10 Dasar Hukum Anggaran Dana Desa (ADD)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan pengaturan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk rumusan besaran yang diserahkan kepada masing-masing desa yang dananya dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah mangacupada surat edaran menteri dalam negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor : 140/640/SJ perihal pedoman Alokasi Dan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Desa kepada pemerintah Desa, yang kemudian pertama kali ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

Pemberian kewenangan untuk menyusun kebijakan di tingkat pemerintah Kabupaten /Kota tersebut tidak berarti sebagai suatu investasi yang terlalu jauh terhadap kewenangan yang telah di berikan kepada desa, tetapi semata-mata dimaksudkan sebagai suatu upaya agar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan arahan diberikannya dana tersebut. Namun tidak kalah pentingnya upaya untuk selalu meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan atau penatausahaan keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawab anggaran .

2.11 Penelitian Terdahulu

Analisis pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R.N Wokas, Tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan dan tanggungjawaban anggan pendapatan dan belanja desa telah sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Bagaimana aparat Desa membuat laporan pertanggung jawabannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan desamulai dari perencanaan sampai tanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memaham teknis pembuatan laporan penanggungjawaban.

2. Pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa di desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Lestari, Tahun (2015) Universitas Riau. Dalam penelitiannya peneliti memerlukan data primer berupa penyebaran angket dan observasi langsung kepada seluruh pegawai desa dan beberapa masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai desa dan beberapa orang masyarakat di desa Kemang. Proses penyusunan anggran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan, kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang di capai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program. Yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesaksian anggaran melihat dari jumlah populasi yang kurang dari 100 hanya berjumlah 32 orang, dengan menggunakan teknik radom samling yaitu keseluruhan populasi mempuyai kesempatan yang sama untuk dipilih,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

caranya adalah dengan menggunakan undian, ordinal atau secara acak, Berdasarkan pengelolaan data dapat disimpulkan bahwa dalam analisis pengeloan anggaran penerimaan dan belanja desa Kemang di dalam kategori sesuai (78,95%) namun, berdasarkan observasi.

Penelitian yang lain mendukung yaitu: Irma (2015) Universitas Tadulako , Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip- prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerinthan Desa Di wilayah Kecamatan Dolo Selatan dalam pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) Tahun Anggran 2012. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Dolo Selatan telah dilakukan dikelola secara akuntabel dan trasparan . Padahal, penerapan prinsip Akuntabilitas pada tahap ini terbatas pada akuntabilitas fisik ,Admistrasi belum telah sepenuhnya dilakukan dengan ketentuan . Utama kendalanya adalah pejabat pemerintahan daerah dan kompetensi sumber daya manusia belum dioptimalkan dengan demikian, asisten dari pejabat pemerintah daerah diharuskan untuk terus berjalan.

Anwar syahbana Rambe,(2017) Universitas Islam Riau judul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Studi di Desa Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir . Hasil Penelitian Pemberdayaan merupakan program yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dan bertaraf hidup yang layak seperti hidup dikota yang terpasilitasi dari pemerintah, pemberdayaan sendiri adalah seperti pemberian kepercayaan pemerintah kepada kepala desa atau penghulu untuk mengelola sumber dayanya agar desa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat desa pada umumnya.

Hadi Siswanto (2018) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Adapun penelitian berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kelebuk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Setelah Pemekaran”. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Kelebuk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Permasalahan yang terjadi dari penelitian ini adalah lambannya pembangunan desa, terutama pada bagian infrastruktur jalan poros yang menjadi satu-satunya sarana yang digunakan untuk beraktivitas. Kemudian 100% RKP tidak bisa di realisasikan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun perlu perbaikan dalam tahap perencanaan mengingat kondisi desa merupakan desa yang baru saja mekar.



2.12 Defenisi Konsep

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana di tulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain :

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut .

2. Keuangan daerah adalah bagian dari keuangan negara, oleh karena itu keuangan negara daerah dapat juga diartikan sebagai sesama hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

3. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

4. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak terdisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan pembuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban desa .

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuj desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dan adesa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa ini sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

2.13 Konsep Operasional

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (Pasal 13 Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016)	1. Transparan	1. Keterbukaan informasi pengelolaan alokasi dana desa asparat desa kepala masyarakat 2. Adanya sosialisasi RAPB Desa kepada masyarakat 3. Keterbukaan prosedur (Pengambilan keputusan atau penyusunan rencana) 4. Transparansi penggunaan dana desa 5. Pengetahuan masyarakat
	2. Akuntabel	1. Pengelokasian anggran dilakukan secara konsisten. 2. Dalam pengelolaan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif 3. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan ADD
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	3. Partisipatif	1. Adanya akses untuk berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa. 2. Memiliki ketertiban dalam pengelolaan alokasi dana desa. 3. Proses pengambilan keputusan. 4. Menentukann kebutuhan
	4. Tertib dan Disiplin Anggaran	1. Profesionalitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. 2. Kesesuaian prosedur dalam penggunaan anggaran

Sumber : Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016

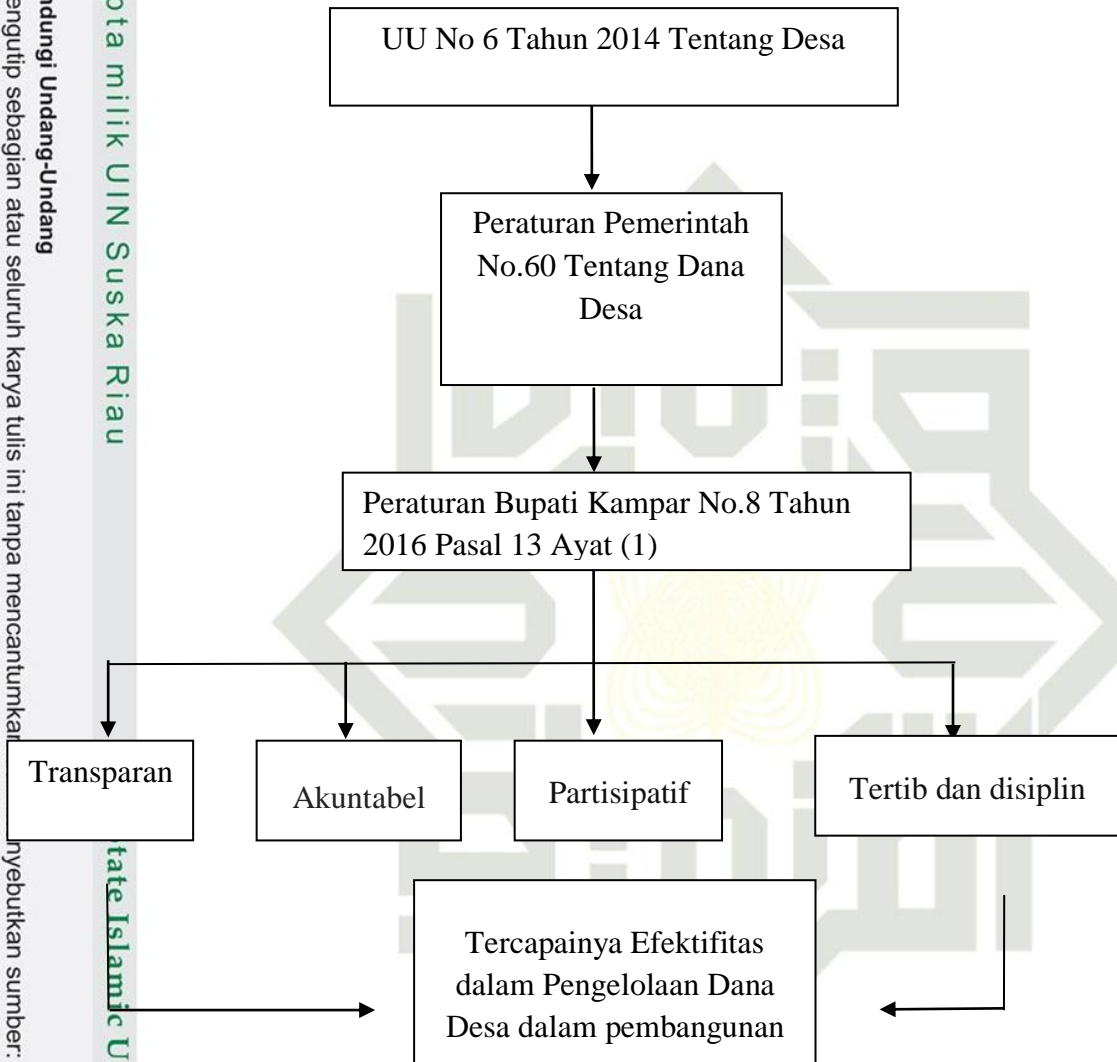
2.14 Kerangka Berpikir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2005:11) adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utrara . Penelitian ini dimulai sejak bulan November 2019 sampai selesai dalam upaya mengumpulkan fakta-fakta yang memperkuat untuk penelitian ini. Dengan beberapa alasan, yaitu:

- a) Unsur kelangkaan studi berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa di lokasi penelitian. Belum pernah dilakukan studi yang dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan pembangunan di Desa Sawah .
- b) Unsur alamiah, proses permasalahan yang terjadi dilokasi penelitian terkait objek penelitian terjadi secara alamiah tanpa dibuat-buat.
- c) Unsur keterjangkauan. Lokasi penelitian terjangkau baik dari segi tenaga, dana, maupun efisiensi waktu. Sehingga memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden penelitian lapangan mencakup: data hasil tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sawah yang didapatkan melalui angket maupun wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua guna melengkapi penelitian ini meliputi: Peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan otonomi desa bagi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar kebijakan atau program-program yang telah dijalankan berhubungan dengan otonomi yang dimiliki desa.

3.4 Informan Penelitian

(Moleong 2000 : 97) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yaitu :

1. Informan kunci (*Key Informan*)

Key informan adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.

Tabel 3.1 *key informan*

No	Uraian	Jumlah
1.	Sekretaris Desa	1
2.	Kaur Keuangan	1
3.	Kaur Umum	1
4.	Masyarakat	3
	Jumlah	6

Sumber : Kantor Desa Sawah, Tahun 2019

Kriteria Key Informan atau Informen Penelitian

Adapun yang peneliti jadikan sebagai *Key Informan* adalah *Subjek* ataupun individu, masyarakat yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

- 1) Berada didaerah yang diteliti
- 2) Mengetahui serta terlibat langsung dengan kejadian / permasalahan
- 3) Bisa berargumentasi dengan baik
- 4) Merasakan dampak dari kejadian / permasalahan.

3.6 Validasi Data

Guna mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang di sebut dengan validasi data.

Validasi data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin validasi data yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik triangulasi data. Yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan perbandingan terhadap data yang diperoleh dari seseorang informan, akan dibandingkan dan dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan validitas data.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *trianggulasi* sumber (data). Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda – beda yang tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan :

a. Observasi/pengamatan

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

Pengamatan dilakukan di Kantor Desa Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas jawaban tersebut (moeleong, 2002:135) dimana dalam penelitian ini peneliti mengajukan tanya jawab langsung kepada pihak Pemerintahan desa yang sangat mengetahui tentang Pembangunan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tersebut berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan.

c Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya.

3.3 Metode Mengelola Data

Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, peneliti mengelola data dengan teknik deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2013). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada pelaksanaan pembangunan desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar .

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaikmungkin, tanpa adanya penambahan dari fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang



telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait pelaksanaan pembangunan desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Semua data mengacu pada informasi data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka dapat ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu kepada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian, guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Sawah

Desa Sawah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang mana terdapat 8 desa dan salah satu desa yaitu Desa Sawah. Desa Sawah merupakan Ibu Kota Kecamatan Kampar Utara yang mana terletak ditengah-tengah Kecamatan Kampar Utara dan Kantor Kecamatan Kampar Utara berada di Desa Sawah dan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan jarak 12 Km. Desa Sawah mulai terbentuk melalui program pemekaran dari Kenegrian Airtiris dimulai pada tahun 1973 pemerintahan dipimpin oleh Wali Negeri, dan setelah pemekaran Desa Sawah, Desa ini dipimpin oleh seorang Wali Muda yang bernama M. Nasir, pada tahun 1973. Sekarang jumlah penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 3250 jiwa yang tersebar di 8 wilayah RW dan 16 RT.

4.2 Batas Wilayah

Adapun batas wilayah Desa Sawah adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara

4.3. Visi dan Misi Desa Sawah

4.3.1 Visi

Kebersamaan dalam membangun demi Desa Sawah yang lebih Maju dan Berakhlak

Peningkatan Infrastruktur Desa Sawah

Terwujudnya Pelayanan Public yang di dukung Oleh sumber Daya Aparatur Dan sumber Daya Alam Yang Mandiri,Agamis, Sejahtera Lahir Batin.

4.3.2 Misi

1. Bersama Masyarakat memperkuat Kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat melayani Masyarakat secara optimal
 2. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
 3. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Sawah yang aman, tentram dan damai.
- Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Desa Sawah

Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Desa Sawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana di Kantor Desa Sawah

SUB INDIKATOR	KONDISI
Sarana dan Prasarana	
Kantor Desa	Baik
Gedung Serba Guna	Ada
Perangkat Desa	Ada
Mesin tik atau komputer	Ada
Kendaraan dinas	Ada
Struktur Organisasi	Ada
Keuangan	
APBD Desa	Ada
Belanja Pembangunan	Tidak Lengkap
Akuntabilitas	
Kotak pengaduan masyarakat	Ada
Laporan kinerja tahunan	Ada
Laporan akhir jabatan	Ada
Papan informasi pelayanan	Ada
Administrasi	
Buku registrasi pelayanan	Ada
Buku profil kelurahan	Ada
Administrasi keuangan	Ada
Kartu uraian tugas	Ada
Administrasi penduduk	Ada
Administrasi pembangunan	Ada
Buku data dan lembaga kemasyarakatan	Ada
Buku registrasi umum	Ada
Peta wilayah	Ada

Sumber: Kantor Desa Sawah 2019

Dari tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Desa Sawah telah memadai untuk menjalankan kegiatannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5. Kondisi Wilayah

Keadaan Topografi Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada umumnya dataran rendah sehingga tanahnya cukup subur untuk dijadikan lahan pertanian. Itu terlihat beberapa daerah di Desa Sawah terdapat perkebunan sawit, perkebunan karet, pertanian padi, dan sayuran yang menjadi mata pencaharian bagi masyarakat setempat.

4.6. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 3250 jiwa yang tersebar di wilayah 8 RW dan 16 RT. Adapun data penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Desa Sawah

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1616
2.	Perempuan	1634
3.	Jumlah Kepala Keluarga	844
4.	Jumlah Penduduk	3250

Sumber Data: Kantor Desa Sawah Tahun 2019

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 3250 jiwa, terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 1616 jiwa, jumlah perempuan 1634 jiwa dengan 844 Kepala Keluarga (KK). Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah angka pertumbuhan penduduk di Desa Sawah semakin tahun semakin bertambah.

4.7. Mata Pencapaian Penduduk Desa Sawah

Penduduk Desa Sawah memiliki mata pencapaian yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Mata Pencapaian Penduduk di Desa Sawah

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1610 Orang
2.	Pertukangan	23 Orang
3.	Pedagang	340 Orang
4.	PNS	57 Orang
5.	TNI	3 Orang
6.	Perkebunan	126 Orang
7.	Lainnya	112 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Sawah

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah mata pencapaian petani sebanyak 1610 orang, pertukangan sebanyak 23 orang, pedagang sebanyak 340 orang, PNS sebanyak 57 orang, TNI sebanyak 3 orang, dan perkebunan sebanyak 126 orang dan lainnya sebanyak 112 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah mata pencapaian penduduk Desa Sawah lebih banyak bertani dan berdagang.

4.8. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

4.8.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk mamajukan suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas

SDM dalam suatu masyarakat tersebut. Sarana pendidikan di Desa Sawah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan di Desa Sawah

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Kelompok Bermain	3
2.	Taman Kanak-kanak	1
3.	Sekolah Dasar	2
4.	Madrasah Ibtidaiyah	4
5.	SLTP/ Tsanawiyah	1

Sumber Data: Kantor Desa Sawah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa Sarana Pendidikan yang terdapat di Desa Sawah tergolong baik dalam artian bisa menunjang dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

4.8.2 Kehidupan Beragama

Agama sangat penting bagi manusia, karena agama merupakan satu pola aqidah yang mencakup unsur kepercayaan. Kehidupan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Desa Sawah cukup baik dan penduduknya mayoritas beragama islam, dan tidak ada satupun masyarakat Desa Sawah yang Non Muslim. Sebagaimana tempat peribadatan yang ada di Desa Sawah dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Sarana Peribadatan di Desa Sawah

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Mushallah	9
3.	Gereja	0

Sumber Data: Kantor Desa Sawah Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel 4.5 diatas terlihat bahwa Sarana Peribadatan yang ada di Desa Sawah adalah Masjid dan Mushallah, sudah jelas bahwa mayoritas penduduk Desa Sawah adalah muslim dan tidak ada non muslim.

4.9 Kesehatan

Dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan satu buah puskesmas dan dua buah posyandu, yang mana Puskesmas buka setiap hari sabtu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan posyandu buka sekali seminggu setiap hari kamis. Bila dilihat dari intensitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa sawah masih dirasakan kurang oleh masyarakat akibat kurangnya alat medis yang resedia.

4.10 Adat Istiadat

Masyarakat Desa sawah Kecamatan kampar Utara menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat, masyarakat desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga melakukann upara syukuran pertanian yang dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun desa.

Adapun permuka adat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berjumlah lima orang yang di angkat sebagai penghulu dari suku-suku yang ada

dan di angkat oleh kemenakan mereka dengan sistem pemilihan kepada kemenakan yang memahami adat secara baik dan benar.

Sarana transportasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga menggunakan sarana transportasi angkutan umum yakni becak/kendaraan roda tiga dan ojek yang beroperasi setiap harinya. Dalam kesaharian sarana transportasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi kepasar dan juga dapat dipakai untuk mengangkut barang dagang.

Sarana komunikasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga bisa menerima sebagai informasi dan berita-berita melalui sarana Radio dan Televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.

4.11 Potensi Desa

Potensi desa adalah segala sumber alam dan sumber manusia yang terdapat dan tersimpan di desa yang dapat di manfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa.

1. Adapaun Potensi Pertanian :

Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan di desa . Sawah (Padi) Selain menjaga kesuburan tanah lahan pertanian yang ada, diisi ekonomi pola penerapan yang dilakukan juga sangat menjanjikan keuntungan. Bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari modal ini juga bisa memberikan tambahan bagi mereka yang ingin menyimpan hasil dari pengelolaan pertanian untuk tabungan masa depannya.



2. Potensi Perikanan :

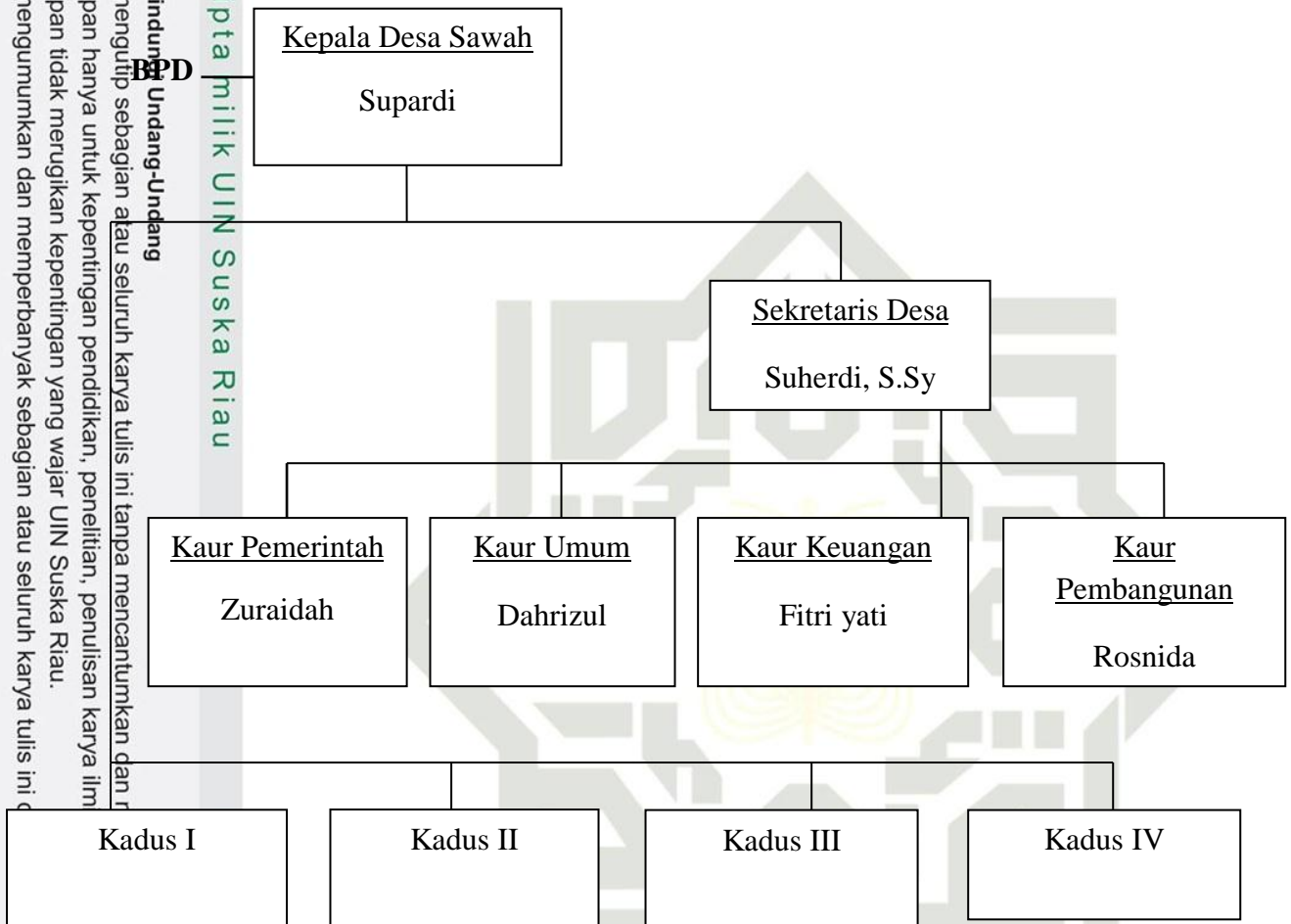
Di bidang perikanan budidaya ikan patin yang di kembangkan melalui keramba (kolam ikan berupa rakit) di desa sawah. Usaha Sistem Variasi Ikan Keramba di Desa Sawah Dari segi perairan maka Desa Sawah merupakan salah satu Desa yang sangat potensial untuk mengembangkan usaha keramba, karena mempunyai perairan air tawar yang cukup luas yang terdiri dari sungai yang mana masyarakat menamai sungai tersebut sungai Kampar. Usaha keramba dimulai sejak tahun 2006 yang pertama kali dilakukan oleh pak Edi, yang mana pak Edi memelihara satu jenis ikan saja dan itu hanya berlangsung dua tahun, karena pendapatannya tidak mengalami kenaikan, namun pada tahun 2008 pak Edi mulai memelihara berbagai jenis ikan yaitu dengan memvariasikan ikan yang dipelihara dalam satu unit keramba. Dan itu membuat hasil pendapatannya meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019



Sumber : Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar masih belum optimal. Ini bisa dilihat dari beberapa indikator yang belum terlaksana salah satunya transparan karena beberapa informasi mengenai dipublikasikan kepada masyarakat. Seperti, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum juga optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

Hambatan Kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah lemahnya sumber daya manusia yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar , minimnya kegiatan-kegiatan pelatihan dan penyuluhan terkait masalah Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar maupun pemerintah desa dan Partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mendukung proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Serta kurangnya komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat/juga menjadi hambatan dalam pengelolaan dan desa.



62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

1. Kepala desa diharapkan lebih memperhatikan perancangan pengelolaan alokasi dana desa agar tepat sasaran, berorientasikan kepada kebutuhan masyarakat agar mendorong percepatan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.
2. Masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa, karena pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja namun juga tanggungjawab masyarakat desa.
3. Perangkatnya harus meningkatkan transparansi pengelolaan aloaksi dana desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
4. Aparatur Desa seharusnya lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Komunikasi itu membawa hubungan antara mengambil dengan keduanya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Qur'an**
1. QS. Muhammad Ayat 21
 - QS. ArRa'd Ayat 11
 - QS. Al Maidah Ayat 8
- Buku**
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* : Jakarta : Rineka Cipta
- Anwas, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi* Alfabeta, Bandung.
- Chandra Kusuma Putra. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Universitas Brawijaya Malang
- Dr. J. Kaloh.2007. *Mentri Bentuk Otonomi Daerah* . Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Wijaja, 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Wijaja HAW 2004. *Otonomi merupakan otonomi yang bulat dan utuh*. PT. Raja Grafindo Persada
- Meloni, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Prof. Dr . Ir. Tatok Mardikanto, M. S, Dr. Ir. H. Poewoko soebiatu, M.Si 2013. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*.Bandung : Alfabeta
- Pranaka, 1996,*Konsep Kebijakan dan implementasi*,Jakarta : Jakarta For Strategi and Internasional Studies
- Poerwadarminta, 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Sahdan dkk. 2006. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yokyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabetha



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan model-model pemberdayaa* : Yogyakarta : Graha Ilmu
- Saparian, Hempi suyatna. 2003. *Pengembangan masyarakat dari pembangunan sampai pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Nurlan, 2007. *Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)*. PT.Macanan jaya Cemerlang
- Lifa Indri Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Univesitas Brawijaya*, Malang
- Mas'ood muchtar, 1997, *Perberdayaan politik* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Musgrave, 1993, *Keuangan Negara dalam teori dan praktek* : Jakarta : Erlangga
- Theresia, Aprilia, Dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Surakarta : Alfabeta
- Wasistiono, Sadu dan Muan Tahir, 2006. *Prospek pembangunan Desa. Jatinagor*
- Kesi Widjajanti 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 12, Nomor 1, Juni, Semarang
- J. Moleong. Lexy. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hari Sabarno, 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bagoni, Suyanto dan Sutinah, 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Prenada Media
- Abdul Hafiz Tanjung, 2011. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Jurnal**
- Candra Kusuma Putra. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo, 2001. *Pengawasan, pengendalian, pemeriksaan kinerja pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah* . Jurnal Bisnis akuntansi

Undang-Undang dan Peraturan

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 3. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Peraturan menteri dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA :

1. Bagaimana cara pemerintahan desa melakukan transparan(keterbukaan) informasi terhadap pengelolaan anggaran dana desa (ADD) kepada masyarakat ?
 2. Apakah pemeritahan desa melakukuan sosialisasi terhadap masyarakat ?
 3. Kapan sosialisasi dilakukaan/ diadakan seberapa sering sosialisasi dilakukan?
 4. Apakah pemerintahan desa mengalokasikan anggaran secara berskala ?
 5. Bagaimana sikap pemerintahan desa dalam menyikapi pengelolaan anggaran dana desa (ADD) ?
 6. Bagaimana cara pemerintahan desa dalam menyikapi pengelolaan anggran dana desa (ADD) yang kurang disiplin ?
 7. Bagaimana cara pemerintahan desa dalam melakukan ketertiban pengelolaan anggaran dana desa ?
 8. Bagaimana pemerintahan desa menyikapi dalam menggunakan anggaran dana desa (ADD) ?
 9. Apakah penggunaan anggaran dana desa (ADD) sesuai dengan prosedur ?
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

FOTO WAWANCARA BERSAMA MASYARAKAT DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



FOTO DENGAN APARATUR DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO BERSAMA DENGAN PERANGKAT DESA SAWAH
KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR



Hak Cip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/17354
TENTANG



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/502/2019 Tanggal 11 Januari 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

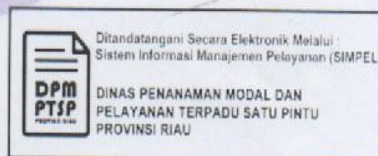
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : DESY SULASTRI |
| 2. NIM / KTP | : 11575204908 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA



REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1021

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27619 tanggal 08 November 2019 dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : DESY SULASTRI |
| 2. NIM | : 11575204908 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DAN DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2018 DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Oktober 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kasi Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar Utara di Sawah.

Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR UTARA
KANTOR KEPALA DESA SAWAH**

ALAMAT : Jln. Kecamatan Dusun Tanjung Desa Sawah

KODE POS : 28461

Sawah, 19 Agustus 2019

Nomor : 100/Pem/831
Lampiran : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial
Di
Pekanbaru

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berdasarkan Surat Saudara/i Nomor : 070/Kessos/390 tanggal 24 Oktober 2019, perihal Rekomendasi Izin Riset Atas Nama :

N a m a : DESY SULASTRI
Nomor Mahasiswa : 11575204908
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi Dan Ilmu Sosial /Administrasi Negara
Jenjang : S1
Universitas : Uin Suska Riau
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2019 DI DESA SAWAH KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR.

Lokasi Penelitian : Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Untuk itu kami Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara pada prinsipnya Dapat Memberi Izin Kepada Yang bersangkutan Dengan Catatan Tidak Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan riset tersebut berlangsung selama 3 (tiga) Bulan, terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

DIKELUARKAN DI: S A W A H
PADA TANGGAL : 19-11-2019
An. KEPALA DESA SAWAH



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama DESY SULASTRY dengan panggilan Desy lahir di Air Tiris pada tanggal 23 Juni 1996. Penulis merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara dari ayahanda bernama Dasman dan ibunda bernama Zaimar. Penulis menyelesaikan pendidikan di mulai Sekolah Dasar (SD) Negeri 004 Bangkinang, (lulus pada tahun 2009). Pada tahun yang sama penulis melanjutkan kejenjang berikutnya yaitu Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang (lulus pada tahun 2012) dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Bangkinang Kota (lulus pada tahun 2015), setelah menamatkan Pendidikan di SMA Muhammadiyah Bangkinag penulis melanjutkan studi S1 Tahun 2015 dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kampar dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.” Hasil Penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah (Oral Comprehensif) pada tanggal 20 Desember 2019 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (**S.Sos**).

- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.